

ARTIKEL PROSIDING SEMINAR NASIONAL “REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA”



Judul Artikel: Pembudayaan Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

Penulis: Asep Wawan Jatnika, Epin Saepudin, Chairil Nur Siregar

Editor: Arief Wahyudi; Ramsul Nababan; Fazli Rachman

Judul Prosiding: Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; *Digital Library*, 15 Oktober 2019

Penerbit: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Kota Penerbitan: Medan

Tahun Terbit: 2019

Halaman: 43-54

Saran Pengutipan:

Jatnika, A.A., Saepudin, E. & Siregar, C.N. (2019). Pembudayaan Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dalam A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019* (hlm. 43-54). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

INFORMASI ARTIKEL

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia” di *Digital Library* Universitas Negeri Medan, Medan – Sumatera Utara. Seminar Nasional tersebut diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Pada 15 Oktober 2019.

Prosiding seminar nasional ini dapat diunduh di:

https://drive.google.com/open?id=1ZMI_eDXTvvp6Etj4roSBa32wNvSdA-AI

PEMBUDAYAAN NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN BAHASA INDONESIA

Asep Wawan Jatnika, Epin Saepudin, Chairil Nur Siregar

Institut Teknologi Bandung, Bandung
epin.saepudin@itb.ac.id

Abstrak

Identitas dan integrasi nasional dewasa ini menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Identitas dan integrasi nasional merupakan dua entitas yang berbeda, namun satu sama lain saling berkaitan, terutama dalam makna semboyan negara “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembudayaan nilai *Bhinneka Tunggal Ika* melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia ditengah fenomena merebaknya isu identitas yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi dengan lokasi penelitian terletak di Institut Teknologi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembudayaan nilai *bhinneka tunggal ika* di perguruan tinggi. Kontribusi dua mata kuliah ini dapat dilihat dari sisi konten dan strategi pembelajaran yang memperkuat pemahaman mahasiswa akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural. Pendidikan kewarganegaraan memosisikan mahasiswa sebagai warga negara yang harus mampu bersatu dalam keberagaman sebagai wujud warga negara yang cerdas dan baik, sedangkan bahasa indonesia melihat kekuatan bahasa sebagai pemersatu bangsa.

Kata kunci: *Bhinneka Tunggal Ika*, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Melemahnya integrasi nasional yang belakangan ini terjadi disebabkan oleh semakin meruncingnya isu identitas di Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin jauh dari kondisi ideal, meningkatnya intoleransi, serta menguatnya isu primordialisme, menjadi tontonan yang hampir setiap hari dapat kita saksikan di televisi, media massa, dan media sosial. Praktek politik yang menjadikan identitas sebagai komoditasnya, turut memperlebar spirit keberbedaan, dibandingkan spirit pemersatuan. Padahal, sejak Indonesia ini berdiri, semboyan negara *bhinneka tunggal ika* sudah merepresentasikan kondisi bangsa Indonesia yang mampu bersatu dalam keberagaman.

Meruncingnya isu identitas, baik berbasis pada ras maupun agama dapat kita lihat dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada masa itu, kita dapat melihat bagaimana identitas “dimainkan” untuk dapat menarik simpati warga DKI Jakarta dan mendorong kemenangan pasangan Anies Baswedan dan

Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara sebanyak 3.240.332 atau 57,95% dari total suara sah (Lestari, 2019). Isu identitas pun terus menggelinding dan turut serta mewarnai pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Terlepas dari persoalan politik yang telah terjadi, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak sosial yang terjadi pasca perhelatan politik tersebut. Nuansa politis yang memainkan isu identitas dan keberbedaan antar kandidat, secara signifikan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, bahkan pada semua tingkatan. Mulai dari kalangan elit, masyarakat umum, bahkan tidak sedikit sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi pun ikut serta larut dalam persoalan identitas tersebut. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka disinyalir dapat memperlebar ruang terjadinya diharmonisasi oleh karena merenggangnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi menguatnya isu identitas yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa sejatinya telah dipikirkan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana nampak pada perkataan Bung Karno bahwa “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsa sendiri”. Salah satu yang dipikirkan oleh pendiri bangsa adalah karena Indonesia yang terbentang dari sabang samapi merauke memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari sisi etnis, agama, budaya, ras, dan bahasa yang digunakan.

Keberagaman dan kebersatuan bangsa Indonesia merupakan keniscayaan yang menjadi kebanggaan sekaligus persoalan. Saat ini, isu kebhinnekaan jauh lebih menonjol daripada isu persatuan dan kesatuan, karena itu bahaya disintegrasi selalu menjadi ancaman faktual sekaligus ancaman potensial bagi bangsa Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh, dalam kehidupan bangsa yang berbhinneka, bahaya disintegrasi memang merupakan ancaman yang nyata. Namun demikian, sebagaimana tertuang dalam semboyan negara, Indonesia tidak hanya berbhinneka, tetapi juga tunggal ika. Indonesia disatu sisi mengakui realitas keberagaman, namun disisi lain selalu mencita-citakan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Karena itu, peluang integrasi bukan hanya khayalan, melainkan suatu keniscayaan.

Artikel yang merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul “pembudayaan nilai pluralisme dalam memperkokoh prinsip bhinneka tunggal ika di perguruan tinggi” ini akan membahas bagaimana strategi pembudayaan nilai bhinneka tunggal ika yang dilakukan perguruan tinggi, terutama melalui program kurikuler pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Dipilihnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia sebagai fokus pembahasan, dikarenakan kedua mata kuliah ini memiliki posisi strategis dalam memperkokoh identitas dan integrasi nasional.

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagaimana kita ketahui bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan pasal 35 ayat (3) huruf c UU No.12 Tahun 2012). Dalam praksisnya, pendidikan kewarganegaraan perlu mengembangkan budaya kewargaan Indonesia yang multikulturalistik-bhinneka tunggal ika dalam berbagai bentuk dan latar (Winataputra, 2008). Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa negara (Pasal 36 UUD NRI 1945), bahasa persatuan, serta bahasa nasional (Moeliono, 2000) yang pada masa lalu memiliki peran strategis, terutama dalam pembentukan ke-Indonesia-an (Sugono, 2011). Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia menjadi salah satu komitmen kebangsaan (sumpah pemuda) yang mengikat seluruh

warga bangsa melalui pernyataan “Kami putra dan putri Indonesia mengaku, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *focus group discussion*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap, meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan Institut Teknologi Bandung dengan subjek penelitian terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pimpinan universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Hakikat Bhinneka Tunggal Ika

“Bhinneka Tunggal Ika” merupakan semboyan negara kesatuan republik Indonesia yang secara umum diartikan walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kata “Bhinneka Tunggal Ika” diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang pada masa itu semboyan ini dijadikan motto untuk mempersatukan wilayah nusantara. Keberadaannya diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada menggunakan bahasa sansekerta “*rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnēki rakwa ring apān kēna parwanosēn, mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua (Setyani, 2009).

Karena itu, jika kita telisik secara lebih dalam, bhinneka tunggal ika sejatinya tidak hanya sekedar semboyan semata, melainkan mengandung makna yang sangat dalam, terutama dalam merepresentasikan realitas sekaligus harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara dua unsur, yakni unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan (Mustansyir, 1995).

Secara filosofis keseimbangan merupakan suatu kondisi adanya kesejajaran antara dua kutub yang seolah-olah kontradiktif secara konseptual. Bhinneka Tunggal Ika yang memuat dua konsep berbeda, terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim. Keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di disisi lain, karena itu dua konsep tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dalam porsi yang setara sehingga mencapai kesetimbangan. Adanya dua konsep yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mengandung problem metafisika, yaitu problem antara kepelbagaian dan kesatuan, problem antara hal banyak dan hal satu (Pursika, 2009). Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan.

Keberagaman bangsa Indonesia oleh karena itu bak pisau bermata ganda. Ia merupakan berkah bagi bangsa di satu sisi, namun sangat potensial menimbulkan konflik pada sisi yang lain. Keberagaman sebagai rahmat terjadi ketika setiap warga bangsa mempunyai keberanian untuk menerima setiap jengkal perbedaan, bukan saja terkait dengan kompetensi keterampilan, namun lebih kepada persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan secara menyeluruh. Sebaliknya, keberagaman dapat menimbulkan konflik dan menjadi kutukan bagi bangsa ini apabila perbedaan dipandang sebagai hal yang menyimpang, pada gilirannya dapat menimbulkan sikap penafian terhadap yang lain.

Sejarah manusia telah mencatat bahwa rasa solidaritas etnis sering kali menjadi dasar dari banyak konflik yang terjadi (Tilaar, 2007). Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dapat kita amati bahwa keanekaragaman budaya menjadi alat ampuh bagi penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua perspektif, yakni horizontal dan vertikal (Nasikun, 2007). Kesatu, secara horizontal kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara vertikal masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Komitmen, kebijaksanaan, dan kecerdasan dalam mengelola keberagaman oleh karena itu menjadi sangat penting. Suatu masyarakat yang dilandasi keragaman yang sangat luas sulit untuk tetap bersatu kecuali apabila anggota masyarakat itu menghargai keragaman itu sendiri dan ingin hidup di sebuah negeri dengan beragam bentuk keanggotan budaya dan politik (Kymlicka, 2002). Agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, masyarakat harus mampu mengatasi disintegrasi potensial yang ada di dalam dirinya sendiri. Seluruh masyarakat dapat berfungsi hanya apabila anggota-anggotanya bersedia untuk mengintegrasikan diri, baik dalam bentuk integrasi normatif yang tercermin dari adanya kehidupan bersama di mana seluruh anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang telah ditentukan, maupun integrasi nilai yang tercermin dari adanya nilai-nilai fundamental yang dijadikan pandangan hidup bersama (Darmaputera, 1997).

Keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak hanya terletak pada satu bidang saja, melainkan terjadi di berbagai bidang, karena itu tepatkah jika berbagai julukan dilekatkan pada Indonesia, baik multi-etnik, multi-agama, multi-budaya, dan lain sebagainya yang menobatkan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk (Pursika, 2009). Keberagaman masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Keberagaman di bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lainnya. Di bidang ekonomi, Keberagaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang akhirnya berimplikasi terhadap munculnya keberagaman pada pola produksi. Di bidang sosial, keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, Keberagaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya.

Pengokohan Prinsip Bhinneka Tunggal Ika melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah mencatat bahwa upaya strategis manusia dalam membangun peradaban sangat memungkinkan dilakukan melalui pendidikan. Konsepsi pendidikan sejatinya

tidak hanya dimaknai dalam kerangka pendidikan formal semata, melainkan non-formal dan informal. Hal demikian dikarenakan dalam proses pendidikan terjadi suatu proses transfer pengetahuan dan transfer nilai akan hal-hal baik yang menentukan kualitas keberadaban manusia.

Terdapat setidaknya empat pesan pendidikan yang direkomendasikan UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa (Arif, 2013). Kesatu, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Keempat, pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri pikiran peserta didik sehingga mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara. Melihat empat pesan yang direkomendasikan, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis untuk mencapai keempat pesan dimaksud.

Hal tersebut dapat dilihat dari praksis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang selama ini berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Institut Teknologi Bandung amat sarat muatan yang mendorong terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang menunjukkan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Muatan tersebut dapat ditemukan dari rumusan tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta materi pembelajaran sebagai berikut.

Kesatu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Institut Teknologi Bandung berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai dasar pengembangan diri mahasiswa dan/atau profesional sehingga menjadi manusia paripurna, meliputi; pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam penyelesaian tugas, bertindak sebagai warga negara yang bangga dan mencintai negaranya serta mendukung upaya perdamaian dunia, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian dan kesadaran sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan, menghormati keragaman budaya, pandangan, keyakinan, dan agama serta pendapat atau kreasi orang lain, menjunjung tinggi upaya penegakan hukum, serta memiliki semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah mengakomodir tiga item dari tujuh item capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan kemudian diterjemahkan lebih jauh menjadi 12 capaian pembelajaran mata kuliah. Dari 12 capaian pembelajaran yang dirumuskan, terdapat setidaknya empat capaian pembelajaran yang secara spesifik mengembangkan kemampuan bersatu dalam keberagaman, antara lain; (a) Kemampuan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai etika pergaulan, (b) Kemampuan memahami perbedaan dalam bingkai persatuan, (c) Kemampuan bekerjasama dalam tim tanpa memandang perbedaan latar belakang agama, etnisitas, dan status sosial, serta (d) Kemampuan manajerial dan kepemimpinan kelompok.

Ketiga, dilihat dari metode yang digunakan, mata kuliah menggunakan pendekatan *student centered learning* melalui penerapan pembelajaran hetagogi (*self-determined learning*) yang mendorong mahasiswa memiliki kemampuan metakognitif dalam memahami dan merumuskan visi ke depan. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya dilakukan secara berkelompok yang merangsang mahasiswa untuk mampu bekerjasama tanpa mempersoalkan perbedaan jurusan, etnis, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Metode tersebut antara lain; pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) melalui penulisan makalah secara berkelompok, survey sosial, dan kampanye kewarganegaraan (*citizenship campaign*).

Keempat, dilihat dari sisi konten pembelajaran, terdapat materi yang secara eksplisit membahas tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Materi tersebut antara lain; dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, serta identitas dan integrasi nasional. Selain itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Institut Teknologi Bandung saat ini berjalan dengan menggunakan kurikulum baru. Terdapat salah satu materi yang penting untuk memperkokoh pemahaman mahasiswa akan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, yakni materi “sinergi untuk kemakmuran bangsa” yang diberikan menjelang akhir perkuliahan. Penempatan materi tersebut diakhir perkuliahan, dimaksudkan agar mahasiswa memiliki bekal pemahaman mendalam bahwa untuk berkontribusi nyata dalam upaya pembangunan nasional, mereka tidak hanya membutuhkan kecakapan sesuai disiplin ilmu, lebih daripada itu mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan pihak lain.

Salah satu ilustrasi yang dapat dijelaskan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang kemampuan dan pemahaman kebersatuan dalam keberagaman adalah pembelajaran pada materi identitas dan integrasi nasional menggunakan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*). Pada praksisnya, pembelajaran tidak hanya menjelaskan konsep-konsep dan teori berkenaan dengan identitas nasional dan integrasi nasional. Lebih daripada itu, pembelajaran menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi, kaitannya dengan isu identitas yang dapat memperlemah integrasi nasional.

Hal ini diperlukan karena pada kenyataannya semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai cita-cita terbayangkan bangsa Indonesia dalam perjalanannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan praktik (Arif, 2013). Pada tataran praksis masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat multikultural sampai saat ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan membahagiakan.

Ini merupakan hal yang wajar adanya, karena secara sosiologis, membangun masyarakat yang toleran tidak semudah membalikkan kedua belah tangan, karena sejarah manusia pada hakikatnya adalah sejarah intoleransi (Misrawi, 2007). Permasalahan yang muncul misalnya dilihat dari kegagalan dalam memahami realitas keberagaman agama yang ada di Indonesia, baik di dalam satu agama, atau pun antar agama. Salah satu faktor utama konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagaman masyarakat yang masih eksklusif (Yaqin, 2005).

Pemahaman atas pentingnya toleransi karena itu mesti menjadi keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan cara itu, kehidupan ini akan lebih bermakna dan bermanfaat. Pemahaman akan keberagaman yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial perlu dibangun, (Yaqin, 2005). Pemahaman keberagaman seperti itu dapat dibangun melalui pendidikan, media massa, maupun melalui interaksi sosial yang intens.

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ini merupakan suatu politik bhinneka tunggal ika yang dilaksanakan melalui pendidikan. Politik Bhinneka Tunggal Ika ini lebih luas dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan (Arif, 2013).

Penguatan integrasi nasional tanpa menghilangkan identitas lokal memerlukan pendekatan budaya, atau setidaknya mengaitkan konsep bersatu dalam keberagaman (*unity in diversity*) dengan realitas keberagaman dalam kehidupan nyata. Pendidikan kewarganegaraan selain menjadi politik bhinneka tunggal ika, juga menjadi suatu proses pendidikan multikultural, yakni suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Bank, 2001). Multikulturalisme meliputi tiga hal. Pertama, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; kedua, merujuk pada keragaman yang ada; dan ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran “isme” menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya (Parekh, 1997). Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural tersebut dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan-kebijakan pendidikan yang peduli dan peka terhadap realitas keberagaman.

Pentingnya hal tersebut dikarenakan keberagaman merupakan suatu yang indah, karena bintang pun menjadi indah karena ada malam, disamping adanya siang. Kalau kita melihat suatu karya seni, kita akan melihat bahwa keindahannya tidak pernah didasarkan kepada keseragaman. Keindahan justru tercipta bila terdapat perbedaan-perbedaan antara bagian-bagiannya yang dipersatukan dalam satu kesatuan tema (Hadi, 1994). Keragaman dari bagian-bagian memperkaya nilai keseluruhan dan juga saling mengangkat nilai yang dimiliki oleh setiap bagian.

Memperkokoh Jati Diri Bangsa melalui Penguasaan Bahasa Indonesia dalam Tata Tulis Karya Ilmiah

Bangsa Indonesia dalam realitasnya merupakan mozaik yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untaian pulau yang terbentang tersebut diisi oleh berbagai individu dan komunitas yang memiliki ciri karakteristik khas, termasuk bahasa daerah yang beragam yang menambah keindahan Indonesia. Keberagaman etnis dan bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia dapat disatukan dengan satu bahasa pemersatu, yakni bangsa Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa sudah muncul. Bahasa Indonesia mampu menjadi sarana ekspresi dalam pernyataan sikap politik identitas pada Kongres Pemuda Kedua 1928 yang menyatakan pengakuan; (a) bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, (b) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan (c) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pengakuan akan adanya bahasa persatuan ini merupakan suatu konsensus kebangsaan yang brilian, mengingat tidak semua bangsa yang multikultur dapat secara konsisten mengakui adanya kesepahaman dalam penggunaan bahasa secara nasional. Sekalipun batasan bahasa seringkali bertepatan dengan batasan negara, tapi situasinya tidak sesederhana itu, karena ada banyak tempat di luar negara Inggris yang menggunakan bahasa Inggris dan Perancis (Wareing, 2006).

Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa harus terus diperkuat sebagai manifestasi dari adanya kemersatuan dalam keberagaman. Keberagaman bahasa daerah (bahasa ibu) yang lebih dari 700 jenis tersebut dapat dipersatukan oleh satu bahasa nasional sebagai alat komunikasi antaretnis yang ada di Indonesia. Penguatan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang mendorong terjadinya integrasi nasional harus dilakukan dalam berbagai bidang, terutama melalui jalur pendidikan yang secara empirik diakui ampuh menjadi strategi kebudayaan dalam membangun peradaban manusia. Pasca-reformasi, muncul berbagai peristiwa atau konflik vertikal dan horizontal disaat bangsa ini sedang memasuki tatanan baru perdagangan bebas regional (MEA) ataupun Asia-Pasifik dan global yang sangat memerlukan penguatan identitas, persatuan dan kesatuan, serta daya saing bangsa. Permasalahan di atas memberikan gambaran betapa penting penguatan bahasa dan sastra Indonesia sebagai medium pembentukan jiwa kebersamaan dalam persatuan sebagai bangsa Indonesia berlandaskan warisan nilai luhur karakter bangsa dalam perjuangan kemerdekaan (Sugono, 2015).

Semua peristiwa di atas makin meneguhkan pandangan dan pikiran kita bahwa bahasa yang paling tepat digunakan untuk pergaulan lintas budaya ketika mulai diterapkannya MEA 2015 nanti adalah Bahasa Inggris, sekalipun bila konteks pergaulan tersebut terjadi di Indonesia, di wilayah dan tanah air kita sendiri (Azis, 2014). Melihat realitas demikian, dapat dikatakan bahwa keadaan Bahasa Indonesia yang di negerinya sendiri masih “centang-perenang” harus menghadapi desakan arus penggunaan bahasa internasional. Karena nyatanya, tidak banyak orang Indonesia yang mampu menggunakannya secara baik dan benar dalam konteks formal, semi-formal, maupun non-formal (Sylado, 2008).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditetapkan menjadi bahasa negara (Pasal 36 UUD NRI 1945), hal ini berarti Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta bahasa resmi kenegaraan. Ini merupakan sebuah pemikiran yang patut di apresiasi, karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional yang seragam dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa dengan latar budaya yang beragam. Singapura misalnya, sekalipun sering kita mengatakan bahwa Singapura adalah negara maju, namun dalam konteks identitas dari sisi kepemilikan bahasa nasional, Singapura belum memilikinya. Di Singapura, terdapat setidaknya empat suku bangsa dengan bahasa etnisnya masing-masing yang tinggal hidup bersama, yakni etnis Tionghoa (mayoritas), Melayu, India, dan kelompok pendatang-ekspatriat asing (mayoritas dari negara-negara Barat yang berbahasa Inggris). Keempat etnis bangsa tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan akan satu bahasa khusus dan unik yang dapat mereka gunakan sebagai alat komunikasi, sehingga Bahasa Inggris yang notabene bukan

bahasa ibu dari ketiga etnis penghuni negara tersebut harus ditetapkan sebagai bahasa resmi negara tersebut (Azis, 2014). Namun demikian, meski telah ditetapkan, pada kenyataannya tidak semua warga negara Singapura mau berbahasa Inggris, mereka lebih suka menggunakan bahasa etnisnya sendiri dalam pergaulan kesehariannya.

Sejatinya bahasa sebagai alat komunikasi memainkan peran strategis dalam setiap interaksi sosial antar masyarakat. Peran strategis ini tampak pada setiap pertemuan antara individu yang satu dengan individu yang lain (Fairclough, 1989). Kontak antara individu yang satu dengan individu yang lain bermakna jika kedua pihak saling memahami pesan yang dikomunikasikan dengan bahasa yang menggunakan simbol bunyi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia berposisi strategis dalam memperkuat identitas nasional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus melaksanakan mata pelajaran (di persekolahan) atau mata kuliah (di perguruan tinggi) bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran/mata kuliah yang wajib di laksanakan. Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan mata kuliah bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembelajaran bahasa Indonesia di Institut Teknologi Bandung lebih berorientasi pada penguasaan penggunaan bahasa dalam tata tulis karya ilmiah. Materi-materi seperti; (a) bahasa dan karya tulis ilmiah, (b) penulisan huruf, kata, dan unsur serapan, (c) pemakaian tanda baca, (d) pembentukan kata, (e) pembentukan kalimat, (f) pola kalimat, hingga (g) membuat kalimat efektif. Pengetahuan dan keterampilan itu kemudian harus menghasilkan sebuah karya tulis dengan memerhatikan tata bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah.

Bahasa merupakan seperangkat sistem lambang yang meliputi kosakata dan kaidah penggunaannya pada tataran kata, frasa, klausa, kalimat, ataupun wacana. Ikhwal pengetahuan tentang bahasa harus dikemas dalam empat aspek belajar bahasa, yaitu; mendengar, berbicara, membaca, dan menulis secara terintegrasi (Sugono, 2015). Karena itu, dalam praksisnya, pembelajaran bahasa Indonesia di Institut Teknologi Bandung bukan hanya berisi pelatihan menulis semata, tetapi juga dari sisi penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi secara lisan (mendengar, berbicara, dan membaca). Bahasa tidak dipandang sebagai unsur-unsur, bagian-bagian, atau potongan-potongan, tetapi dipandang sebagai satu keutuhan dalam berbagai ranah penggunaannya (Purwo, 2002). Karena itu, keempat aspek ini harus dilaksanakan secara terintegrasi, karena bahasa tidak dapat dipandang secara parsial, namun harus secara simultan agar dapat digunakan dalam berbagai kepentingan.

Urgensi mengokohkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, kemudian ditegaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pada Perpres ini diatur secara tegas bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kegiatan yang dilakanakan oleh para pejabat negara dalam lingkup nasional maupun internasional. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk membuat dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik, nota kesepahaman dan perjanjian, berbagai forum baik yang bersifat nasional maupun internasional yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penulisan karya ilmiah dan publikasi ilmiah di Indonesia, serta penamaan wilayah geografi, gedung, nama jalan, dan lain sebagainya.

Keluarnya peraturan ini merupakan wujud nyata pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan diplomasi bahasa. Diplomasi bahasa dilakukan untuk (a) memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa, (b) membangkitkan nasionalisme keindonesian manusia Indonesia, (c) membuka akses perluasan bahasa baik secara ke dalam maupun keluar, (d) mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, (e) membangun keutuhan bangsa Indonesia dan mempererat persahabatan dengan bangsa-bangsa di dunia, dan (f) memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa yang kuat dan bermartabat (Masraeng, 2015). Misi yang ada di dalamnya adalah ingin mensejajarkan posisi bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Di samping itu, diplomasi bahasa Indonesia membuka ruang untuk bangsa-bangsa lain mendalami produk budaya bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pembudayaan nilai bhinneka tunggal ika merupakan langkah penting yang harus dilakukan ditengah kondisi meningkatnya penghargaan terhadap identitas yang mengesampingkan integrasi nasional. Proses pembudayaan nilai tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang memuat substansi dan orientasi dalam penguatan identitas nasional dan integrasi nasional secara seimbang. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia dapat menjadi strategi politik bhinneka tunggal ika di perguruan tinggi, karena dilihat dari konten, strategi, dan capaian pembelajarannya, dua mata kuliah ini turut memperkuat pemahaman akan pentingnya bersatu dalam keberagaman.

Pendidikan kewarganegaraan memperkuat pentingnya menghormati dan menghargai antarsesama dalam menjalani kehidupan di negara yang multikultur melalui bahasan tentang (1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan ligatur bangsa, (2) identitas dan integrasi nasional, serta (3) sinergi untuk kemakmuran bangsa. Bahasa Indonesia berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan melihat kekuatan bahasa sebagai pemersatu bangsa yang memiliki ragam bahasa daerah. Selain itu, penguatan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dilakukan pula melalui diplomasi bahasa Indonesia, baik di kancah nasional maupun internasional. Sehingga melalui diplomasi bahasa, Indonesia dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Model Pembudayaan Nilai Pluralisme dalam Memperkokoh Prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Perguruan Tinggi”. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan dana penelitian pada skema riset simlitabmas untuk kategori penelitian dasar perguruan tinggi. Ucapan terimakasih juga disampaikan untuk Institut Teknologi Bandung yang telah mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian, serta seluruh narasumber yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, DB & Zuliyah, S. (2013). *Nilai-Nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Makalah disampaikan kegiatan Pelatihan Penerapan Kurikulum 2013 MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta, Kamis, 26 September 2013
- Azis, AL. (2014). Penguatan Identitas Bahasa Indonesia sebagai Lambang Identitas Nasional dan Bahasa Persatuan Jelang Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No.1, Mei 2014, hal. 14-20
- Banks, J.A & Banks, C.A.M. (Eds). (2001). *Handbook of Research on Multicultural Education*. New York: MacMillan
- Darmaputera, E. (1997). *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Edinburg: Bovan Publishing.
- Hadi, H. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius
- Kymlicka, W. (2002). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *SIMULACRA*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, ISSN 2622-6952, hal 31-37
- Masraeng, R. (2015). Diplomasi Bahasa Menjembatani Keragaman Bahasa Daerah dan Pengutamaan Bahasa Indonesia. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 April 2015, hal. 155-167
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah
- Moeliono, AM. (2000). *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Dalam H. Alwi, D. Sugono, & A. R. Zaidan (Editor), *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat bahasa
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Parekh, B. (1996). *The Concept of Multicultural Education*. In Sohen Modgil, et.al (ed) *Multicultural Education the Intermitable Debate*. London: The Falmer Press.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- Pursika, IN. (2009). Kajian Analitik terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, No. 1, April 2009, hal. 15-20
- Purwo, BK. (2002). *Perkembangan Pengajaran Bahasa*. Dalam H. Alwi & D. Sugono (Editor). *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Obor dan Pusat Bahasa.
- Mustansyir, R. (1995). *Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*. *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setyani, TI. (2009). *Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa*. Makalah disajikan pada Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia pada tanggal 8-9 Agustus 2009 di Yogyakarta.
- Sugono, D. (2015). Peran Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa*. Bengkulu: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu

- Sugono, D. (2011). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Bahasa Indonesia*. Dalam Sawerigading. Jurnal Bahasa dan Sastra. Makassar: Balai Bahasa Sulawesi Selatan
- Sylado, R. (2008). Kata Kotor, Kata Suci, dan Kata Suka-Suka. Dalam Sutami, Hermina, Wrihatni, & Novika (Penyunting), *Kosakata Bahasa Indonesia Mutakhir*. Jakarta: Pusat Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Wareing, S. (2009). Apa itu Bahasa dan Apa Peranannya. Dalam L. Thompson & S. Wareing (Editor). *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Winataputra, US. (2008). *Multikulturalisme: Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dalam Dialog Multikultural*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

